



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(0536) 3221575

Jl. AIS Nasution No.11, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka
Raya, Kalimantan Tengah 73111

<https://www.dispursip.kalteng.go.id/>
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 KEDUDUKAN	8
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	10
1.3.1. Kepala Dinas.....	10
1.3.2. Sekretariat.....	10
1.3.3. Bidang.....	10
1.3.4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	10
1.4. SUMBER DAYA DINAS	13
1.4.1 Sumber Daya Manusia	13
1.4.2 ISU STRATEGIS Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	15
1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	16
1.6 KEUANGAN	16
1.6.1. Belanja Operasi	16
1.6.2. Belanja Modal.....	16
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	18
2.1.1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana	18
2.1.2. Optimalisasi Manajemen Pendidikan Berdaya Saing Tinggi	19
2.1.3. Penanggulangan Kemiskinan	19
2.2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	21
2.2.1. Perencanaan Kinerja	21
2.2.2. Penetapan Kinerja (LAKIP).....	22
2.2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	24
2.3.1 Tujuan.....	24
2.3.2 Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2021 - 2026.....	25
2.3.3 Rencana Strategis Rancangan Akhir 2025-2029	27
2.3.4 Arah Kebijakan	28
2.4 RINCIAN ANGGARAN TAHUN 2025	28
2.4.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	31
3.2 EVALUASI DAN CAPAIAN ANALISIS KERJA	34
SASARAN 1	35
SASARAN 2	35
SASARAN 3	36
SASARAN 4	36
Target dan Capaian Triwulan Tahun 2025	38
3.3 REALISASI DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA	40
BAB IV PENUTUP	65

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Hasil Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Selain itu, laporan ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Hasil Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, laporan ini mencerminkan capaian kinerja yang terukur terhadap sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja, analisis keberhasilan dan hambatan, serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip daerah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Hasil Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 22 Februari 2026
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



ADIAH CHANDRA SARI, S.H., M.H.
NIP. 19700629 20003 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah daerah perlu memperhatikan tata hubungan susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Tata hubungan kewenangan tersebut harus memperhatikan kekhususan dan keragaman potensi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang meliputi aspek keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya daerah secara adil dan bijaksana. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah peluang dan tantangan dalam memenangkan persaingan global melalui pemanfaatan IPTEK. Diperlukan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dan dukungan informasi melalui bahan pustaka.

Peradaban dan budaya manusia tidak terpisahkan dengan keberadaan perpustakaan. Pernyataan ini mengacu kepada pemahaman bahwa sejak manusia purba mulai menggores pada dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya pada saat itu telah terjadi proses merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Tanda atau gambar digunakan mereka sebagai simbol untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakannya, dan melalui simbol tersebut mereka mengkomunikasikannya kepada pihak lain, dan proses ini sebenarnya cikal bakal kegiatan perpustakaan. Perkembangan selanjutnya adalah sejak ditemukannya mesin cetak, alat dan media rekam serta teknologi digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi ikut mempengaruhi perkembangan kegiatan perpustakaan.

Perpustakaan merupakan rekaman informasi tentang ide, gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan seseorang yang berfungsi untuk disampaikan kepada pihak lain. Di samping itu perpustakaan ikut memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tuntutan perpustakaan ke depan adalah setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan serta berbagi informasi dan pengetahuan, sehingga memungkinkan setiap individu dan masyarakat menggunakan seluruh potensinya bagi pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, diharapkan mampu mengukir dinamika Perkembangan perpustakaan di tanah air, serta sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Untuk mewujudkan hal tersebut di Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Bab XIII pasal (1) pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Lebih lanjut dari pembudayaan kegemaran membaca ini dijelaskan pada pasal (50), pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses serta pasal (51) ayat 2, pelaksanaan gerakan nasional gemar membaca dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Pembudayaan kegemaran membaca ini lebih mudah ditanamkan pada anak sedini mungkin dan berlanjut secara terus menerus. Mewujudkan anak yang mempunyai kegemaran membaca, dapat ditumbuhkan disekolah dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya perpustakaan yang ada dipergustakaan sekolah. Agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca dikalangan generasi muda harus dipupuk dan digiatkan secara serentak dan terpadu. Keberhasilan gerakan membaca akan dapat dicapai secara nasional dengan melibatkan peran serta semua komponen bangsa baik ditingkat pusat maupun daerah. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 (satu) kota, 136 wilayah kecamatan, 139 wilayah kelurahan dan 1.576 desa/kelurahan. Tabel 2.1 berikut menyajikan pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2025.

Table 1.1 . Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi dan Perpustakaan / Lembaga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No	Kabupaten / Kota	Luas Daratan (km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Perpustakaan / Lembaga
1	Kotawaringin Barat	9.480,30	6	13	81	17
2	Kotawaringin Timur	15.543,80	17	17	168	17
3	Kapuas	17.033,54	17	17	214	17
4	Barito Selatan	6.267,08	6	7	86	10
5	Barito Utara	9.984,81	9	10	93	9
6	Katingan	17.500,00	13	7	154	1
7	Seruyan	16.404,00	10	3	97	5
8	Sukamara	3.310,13	5	3	29	12
9	Lamandau	7.632,39	8	3	85	1
10	Gunung Mas	10.804,00	12	12	115	4
11	Pulang Pisau	8.997,00	8	4	95	9

12	Murung Raya	23.700,00	10	9	116	1
13	Barito Timur	3.212,52	10	3	100	9
14	Kota Palangka Raya	2.400,00	5	30	-	82
15	Kalimantan Tengah	153.443,91	136	139	1433	194

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Bidang Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

Sebanyak 1.437 desa/kelurahan masih sangat memerlukan berbagai pembangunan di berbagai sektor di bidang pendidikan khususnya perpustakaan, diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat sejajar dengan Provinsi lainnya adalah jaminan sarana pendidikan sepanjang hayat dan pengembangan minat baca sebagai sebuah kebudayaan masyarakat yang utuh sebab tanpa membaca tidak akan mungkin terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data pengunjung perpustakaan di Perpustakaan Umum dalam Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kunjungan masyarakat ke Perpustakaan dapat dikategorikan masih relatif rendah. Rendahnya kunjungan ke perpustakaan dapat dianalogikan dengan kondisi Perpustakaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain fasilitas pelayanan yang kurang memadai, kurang lengkapnya sarana, kenyamanan dan ketenangan ruang baca serta ketersediaan koleksi yang beragam.

Oleh sebab itu, dalam rangka membangun budaya baca dan tersedianya akses masyarakat dalam menggali potensi sumber informasi dan ilmu pengetahuan, rencana tindak (action plan) dibidang pembangunan perpustakaan dan budaya baca tentu perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terarah. Dalam rangka mengembangkan kegemaran membaca masyarakat disemua tingkat kalangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan melestarikan budaya daerah (local) perlu adanya kegiatan yang dapat memacu masyarakat untuk terus membaca dimulai dari tingkat usia dini (usia sekolah) guna menumbuhkan kegemaran membaca dan kecintaan terhadap budaya local serta bersatu dalam aneka ragam kebudayaan, bersatu dalam perbedaan yang saling menghormati guna memperkokoh persatuan bangsa dan kesatuan bangsa.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dalam perannya di bidang perpustakaan dan arsip memberikan informasi dan capaian kinerja secara efisien, efektif, inovatif, tanggung jawab, dan transparan yang telah terukur tertuang dalam Laporan Kinerja Instans Kinerja Pemerintah yang bisa disebut dengan LAKIP. Pembuatan laporan ini di

tersusun dalam petunjuk teknis penyusunan LAKIP berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP. Dalam Permenpan RB No 53 Tahun 2014 berisi tentang perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan begitu hasil laporan tersebut akan menjadi evaluasi seberapa jauh peningkatan satu tahun instansi pemerintah dalam melakukan program kegiatan yang telah disesuaikan dengan Renja, Renstra, Laporan Triwulan, dan RPJMD untuk melihat perkembangan atau kemajuan yang telah dilakukan dari hasil yang dicapai satu tahun kinerja dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut yang disesuaikan dengan tupoksi dan bidang – bidang yang terhadap pelayanan masyarakat. Terutama masuk dalam lingkup dunia pendidikan yang menjadi patokan penting terhadap generasi penerus untuk lebih mengemari namanya dunia membaca. Salah satunya Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai instansi pemerintah provinsi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dari indikator yang dibuat sesuai dengan program kegiatan yang ada terhadap penilaian dari data jumlah buku yang dibaca, koleksi bahan pustaka yang tersedia dipergustakaan, yang menjadi anggota pemustaka, survey kepuasan pemustaka, bantuan buku untuk perpustakaan desa, serta penerapan arsip secara baku sesuai standar kearsipan dari jumlah OPD di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan laporan ini didukung dengan Undang – Undang No 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan Bab 1 Pasal 1 yang yang menyampaikan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. dan Pasal 4 menjelaskan tujuan perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta Bab II Pasal 10 kewenangan pemerintah (b) mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing. Untuk Kearsipan telah diatur dalam Undang – Undang No 43 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan Arsip rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta tujuan dari penyelenggaraan kerarsipan Bab II Pasal 3 (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perpustakaan Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan realisasi yang dilaporkan merupakan hasil kegiatan tahun 2025.

1.1 KEDUDUKAN

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang di bentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai mana telah tertuang dalam peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 dengan tanggal yang telah diundangkan 20 Februari 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1.2.1 Dalam Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dinas Perpustakaan dan Arsip di Pimpin oleh Kepala Dinas;
- c. Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan rancangan kebijakan teknis bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan Perpustakaan Dan Arsip Sesuai Standar Nasional;
- b. Pengembangan, pembinaan teknis dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan pembinaan teknis kearsipan terhadap Perangkat Daerah Provinsi, BUMD Provinsi dan Kabupaten /Kota sesuai Standar Nasional;
- c. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan di bidang Perpustakaan dan Arsip dengan Pusat, Badan, Unit/ Satuan Kerja lainnya sesuai Standar Nasional;
- d. Pelaksanaan dan Pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam terkait koleksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan dan Pengelolaan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaa layanan koleksi bahan pustaka rujukan, naskah multimedia sesuai dengan Standar Nasional;
- g. Pelaksanaan dokumentasi dan pendayagunaan koleksi deposit dan arsip daerah sesuai Standar Nasional;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional;
- i. Pentapan peraturan dan kebijakan pengembangan fungsional, pustakawan dan arsiparis di skala Provinsi sesuai kebijakan Nasional;

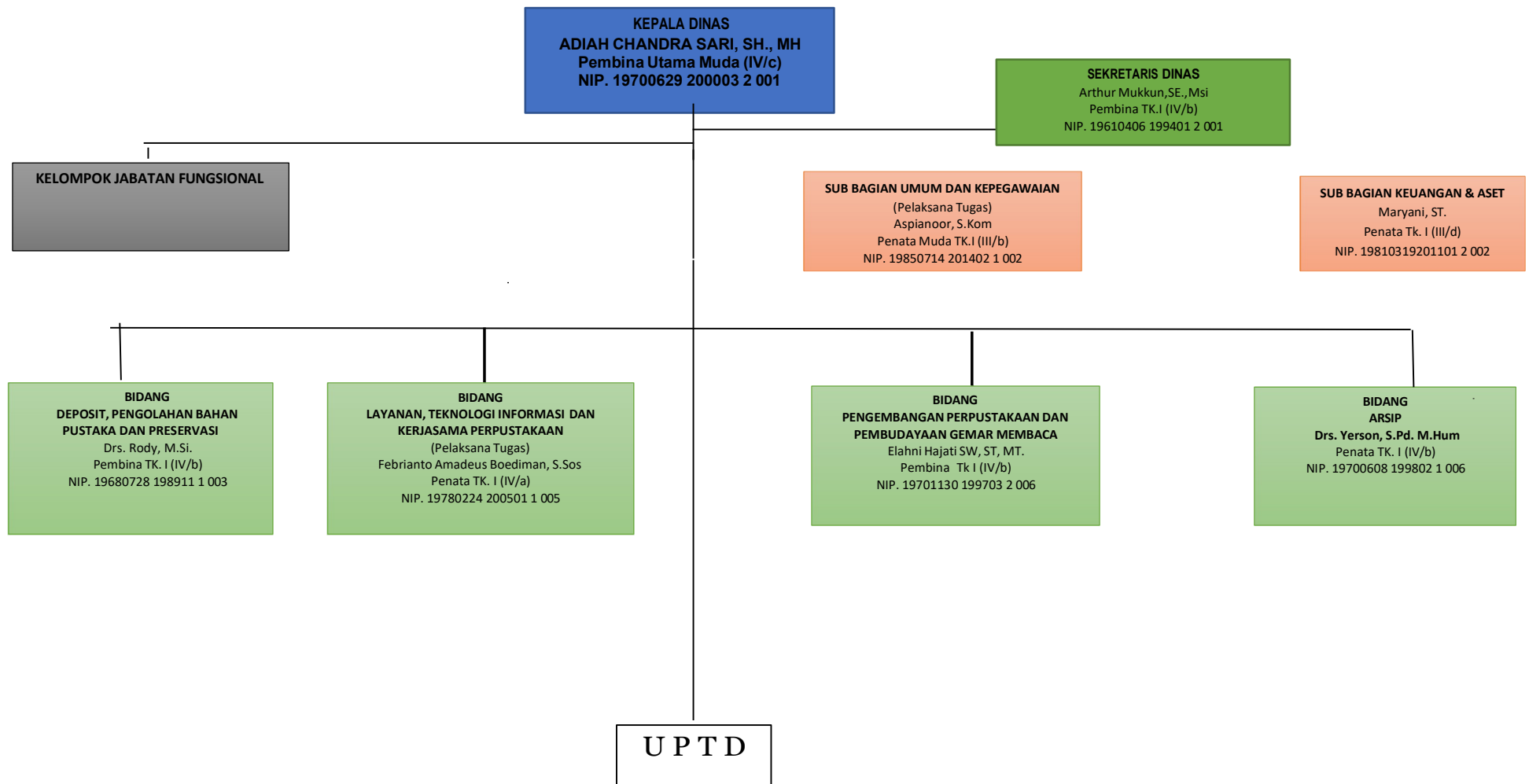
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis di bidang perpustakaan dan arsip sesuai Standar Nasional;
- k. Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis pelaksanaan sampai dengan pustakawan madya dan Arsiparis muda sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk struktur organisasi disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 dengan Bab 1 Pasal 5 susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dalam susunan pelaksanaan kegiatan/program jabatan terhadap tanggung jawab dan topoksi di pemerintahan daerah, sebagai berikut: Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri atas :

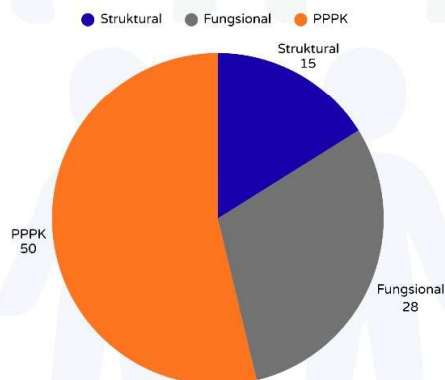
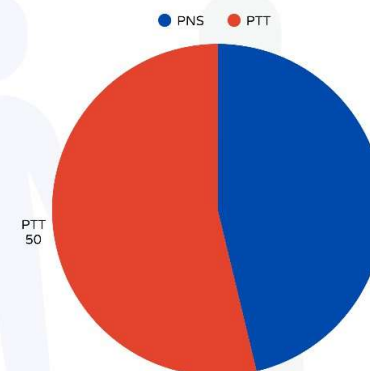
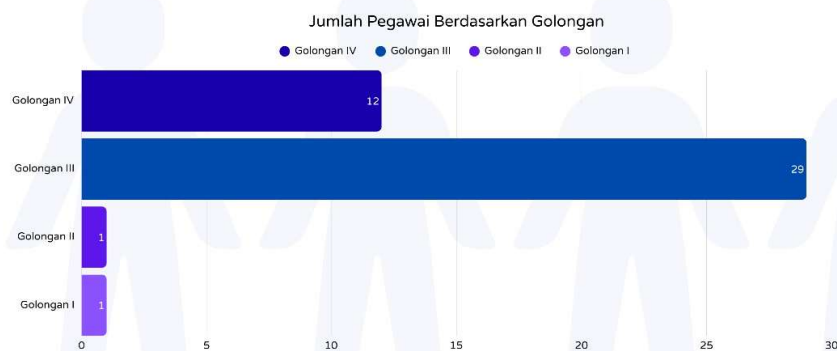
- 1.3.1. Kepala Dinas.
- 1.3.2. Sekretariat.
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1.3.3. Bidang.
 - a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
 - b. Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Kerjasama,
 - c. Bidang Arsip
 - d. Bidang Deposit, Pengolahan dan Preservasi
- 1.3.4. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



DATA PEGAWAI

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah



TOTAL PEGAWAI = 93 ORANG

1.4. SUMBER DAYA DINAS

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut;

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S3. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.

Table 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Dasar (SD)	1	-	1	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1	2	3	
4	Diploma Satu (D-1)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-2)	-	2	2	
6	Diploma Tiga (D-3)	-	4	4	
7	Sarjana (S-1)	12	11	23	
8	Sarjana (S-2)	4	5	9	
9	Sarjana (S-3)	1	-	1	
10	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	14	36	50	
	Jumlah Keseluruhan	34	60	93	

Dari jumlah pegawai PNS sebanyak 48 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 34 orang, kemudian ditentukan komposisi pegawai PNS berdasarkan pangkat golongan.

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/a Juru Muda				
2	I/b Juru Muda Tk I				
3	I/c Juru				
4	I/d Juru Tk I	1		1	
5	II/a Pengatur Muda				
6	II/b Pengatur Muda Tk. I				
7	II/c Pengatur		1	1	
8	II/d Pengatur Tk. I				
9	III/a Penata Muda	2	2	4	
10	III/b Penata Muda Tk.I	2	7	9	
11	III/c Penata		2	2	
12	III/d Penata Tk. I	9	4	13	
13	IV/a Pembina	1	4	5	
14	IV/b Pembina Tk. I	4	1	5	
15	IV/c Pembina Utama Muda		2	2	
16	IV/d Pembina Utama Madya				
17	IV/e Pembina Utama	1		1	
	Jumlah	20	23	43	

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon I			
2	Eselon II.A		1	1
3	Eselon III.A	3	1	4
4	Eselon IV.A		1	1
5	Fungsional Tertentu	13	15	28
6	Non Struktural / Fungsional Umum	3	6	9
Jumlah		19	24	43

1.4.2 ISU STRATEGIS Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu - isu strategis yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya :

- Menumbuh kembangkan minat dan budaya baca bagi masyarakat terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan bisa optimal;
- Meningkatkan keanekaragaman koleksi bahan pustaka yang masih terbatas supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Berupa membangun dan melakukan pertumbuhan perpustakaan desa/kelurahan.
- Melakukan sosialisasi terhadap OPD Prov/Kab Kota agar tumbuh kesadaran pengelolaan kearsipan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ANRI.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik pustakawan maupun arsiparis sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

- ❖ 1.5.1. Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui PERDA Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- ❖ 1.5.2. Ketersediaan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan;
- ❖ 1.5.3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu memberikan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan arsip;
- ❖ 1.5.4. Semakin banyak perpustakaan yang berdiri, dan perlu pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan;
- ❖ 1.5.5. Masyarakat pengguna perpustakaan dan arsip besar jumlahnya.

1.6 KEUANGAN

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Perpustakaan dan arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun pada TA 2025 berdasarkan Dokumen APBD Murni (BO) Belanja Operasi dan (BM) Belanja Modal untuk jumlah Tahun 2025 sebesar Rp.27.720.678.870,-. Untuk lebih jelas dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

1.6.1. Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi, ditetapkan sebesar Rp 16.814.430.907,77 realisasi keuangan sebesar Rp 15.134.021.784,00 atau 90% dan fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp. 1.680.409.123,77-

1.6.2. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal, yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.906.247.962,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.897.614.786,- atau 99,92% dan fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp. 8.633.176,-.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN;

Menguraikan tentang gambaran umum SOPD, tugas pokok dan fungsi SOPD, Isu strategis yang dihadapi SOPD, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA;

Menguraikan tentang perencanaan strategis sebelum reviu dan perencanaan strategis setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;

Menguraikan tentang capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan prestasi atau penghargaan

BAB IV PENUTUP;

Menjelaskan tentang penutupan LAKIP yang menggambarkan hasil kinerja Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam perencanaan dan perjanjian (penetapan) kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan sasaran strategis, capaian, dan realisasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai acuan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pengembangan dan peningkatan Perpustakaan dan Arsip terhadap Meningkatkan Budaya Gemar Membaca di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan menyampaikan laporan dokumen hasil perencanaan dan perjanjian kinerja untuk Tahun 2025 dengan Laporan Realisasi Kinerja (L-KIP) hal ini menjadi patokan Pemerintah Provinsi dalam menilai hasil capaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun keterkaitan kinerja organisasi dalam perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis itu merupakan penjabaran Rencana Kerja tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis meliputi implementasi visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Maju, Kalteng Berkah. Merupakan salah satu misi yang mendukung menjadi bahan acuan program perpustakaan dan arsip, yaitu :

2.1.1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana

Peningkatan yang diberikan terhadap perkembangan dan kemajuan Perpustakaan dan Arsip terhadap Dunia Pendidikan, didasarkan bahwa Perpustakaan salah satu tempatnya jendela dunia yang merupakan koleksi bahan pustaka digital maupun non digital. Serta fasilitas, lingkungan, nyaman yang menunjang ketertarikan pemustaka dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip dari program/kegiatan yang melibatkan pustakawan dan pemustaka terhadap setiap kegiatan yang dilakukan dari lomba membaca, kalteng expo, sosialisasi gemar membaca, story telling, festival literasi, lomba perpustakaan sekolah dll. Kearsipan menjadi salah satu penting dalam dunia pendidikan karena salah satu tempat penyimpanan koleksi atau informasi/dokumen sejarah, acara kegiatan, dan moment/kenangan dari warisan pejuang atau pendahulu maupun pembangun Kalimantan Tengah dari seni, budaya, bahasa, dan teknologi.

2.1.2. Optimalisasi Manajemen Pendidikan Berdaya Saing Tinggi

Mengoptimalkan manajemen pendidikan dimana koleksi bahan pustaka memberikan kebutuhan oleh pemustaka sebagai dasar tujuan, fungsi, dan pengarahannya terhadap penilaian – penilaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diri pemustaka di dunia pendidikan untuk lebih berkembang dan siap maju terhadap kemajuan zaman teknologi, dan sosial dalam memberikan kreativitas, inovasi, dan efisiensi yang bermanfaat untuk generasi muda kedepannya.

2.1.3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan yang dihadapi adalah miskin ilmu dalam pendidikan, miskin ilmu berarti miskin karakter (etika dan moral), budaya, dan sejarah. Karena masih banyak masyarakat yang tuna aksara (tidak dapat membaca dan menulis). Hal ini perpustakaan dan arsip menjadi peran penting terhadap penanggulangan kemiskinan ilmu yang dihadapi, sebab membaca dan menulis tidak hanya didapatkan dari pendidikan (sekolah) tetapi dari perpustakaan bisa dengan program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dalam hal ini, Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang telah tertuang pada Renstra dan L-KIP dengan visi “MEWUJUDKAN PERAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI PENYEDIA JENDELA INFORMASI DALAM MENENTASKAN PEDIDIKAN DAN KEMISKINAN MENUJU KALTENG MAJU, KALTENG BERKAH”

Adapun Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Menciptakan dan memantapkan kebiasaan membaca masyarakat sesuai dengan jenis perpustakaan dan pemakainya
2. Mendukung sebagian fungsi pendidikan perorangan secara mandiri maupun pendidikan formal pada semua jenjang
3. Memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap Konsumen/Pemustaka kesempatan atau stimulasi bagi pengembangan kreativitas dan imajinasi pribadi maupun masyarakat
4. Menanam kesadaran terhadap kearifan lokal warisan budaya, apresiasi seni, dan hasil temuan ilmiah
5. Mendorong perkembangan pertumbuhan perpustakaan secara menyeluruh dari unit-unit pojok baca baik mandiri maupun lembaga

6. Mengembangkan pelayanan perpustakaan dan arsip dalam penyampaian informasi dari yang konvensional menjadi berbasis IT
7. Memperbaiki sarana pendukung perpustakaan dan arsip guna tercipta pelayanan yang mudah diakses, aman dan nyaman
8. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas aparatur pengelola perpustakaan dan arsip sesuai kebutuhan di semua jenjang
9. Membangun sinergi serta kerja sama antar stakeholder dalam mengembangkan perpustakaan dan arsip.

Sesuai dengan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 3 yang dijelaskan bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Serta tujuan perpustakaan dalam Pasal 4 memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga dengan arsip sebagai Media Membangun Karakter Bangsa yang setiap masa/waktu yang telah dijalani atau sebuah dokumen memiliki sejarahnya sendiri. Sejarah disusun berdasarkan sumber yang akan dirangkai jadi fakta sejarah, untuk adanya dokumen diperlukan perlu arsip sebagai catatan perjalanan bukti yang penting, real, dan secara fakta yang bisa dilihat dan dilestarikan sebagai warisan budaya karena memiliki arti penting di masa mendatang yang setidaknya menjadi sebuah warisan bagi anak cucunya.

Tentang fakta – fakta masa lalu sesuai yang tertuang pada UU Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 3 Kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

- a. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan ;
- b. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Hal ini sebagai penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan). Perumusan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, dalam pengembangan dan peningkatan Perpustakaan dan Arsip terhadap tujuan budaya gemar membaca.

2.2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2025 merupakan salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.1. Perencanaan Kinerja

- ❖ Perencanaan merupakan titik awal berbagai aktivitas organisasi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Perencanaan harus dilakukan oleh perpustakaan untuk memberikan arah pembangunan, menjadi acuan kerja, memberikan kerangka pemersatu, dan membantu untuk memperkirakan peluang-peluang (Swasta, 1990 : 34). Dengan perencanaan yang baik, maka seluruh aktivitas organisasi dapat diarahkan menuju titik tujuan yang jelas.
- ❖ Perpustakaan sebagai organisasi atau lembaga, dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas yang menangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan pelaksanaan, dan siapa yang bertanggung jawab atas peleksanaannya Perencanaan yang matang dan jelas dapat dijadikan sebagai pedoman dan standar kerja seluruh elemen yang terkait dalam suatu organisasi/lembaga. Selain itu dengan perencanaan pula dapat diprediksi adanya peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam mencapai tujuan. Langkah awal dalam perencanaan perpustakaan antara lain, penetapan visi dan misi perpustakaan. Disamping itu perhatian terhadap faktor internal dan eksternal. Visi dalam suatu perpustakaan berfungsi untuk memperjelas arah perpustakaan dan motivasi seluruh komponen dalam mengambil tindakan kearah yang benar. Visi yang jelas akan ikut membantu koordinasi aktivitas orang-orang yang terkait dalam perpustakaan itu. Sedangkan misi merupakan rumusan kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat dihitung, dibuktikan, dapat dilihat, maupun dirasakan (tangible).

2.2.2. Penetapan Kinerja (LAKIP)

LAKIP tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Bidang Sektor	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja
1.	Perpustakaan	Meningkat interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial baca	1. Jumlah buku yang di baca di perpustakaan 2. Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan 3. Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan pembinaan perpustakaan berbasis inklusi sosial 4. Ideks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan 5. Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan.
		Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam.	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan
2.	Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal.	Jumlah persentase OPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan
		Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai kaidah kearsipan	Jumlah persentase perlindungan dan penyelamatan arsip

2.2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi

mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran yang diterapkan ke dalam DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025
1.	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang dibaca dipergustakaan (Eksemplar)	150.000
		Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	28.675
		Jumlah Lembaga Perpustakaan yang diberikan pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Unit)	34
		Indeks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan (%)	85
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	36.000
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan (Naskah)	1
3	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal	Persentase SOPD menerapkan arsip secara baku sesuai dengan standar kearsipan (%)	98
4	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	98

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1 Tujuan

- Meningkatkan kualitas aparatur pengelola perpustakaan, arsip dan dokumentasi melalui pendidikan dan latihan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang memadai.
- Mengolah dan mengelola arsip inaktif yang berasal dari SKPD dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
- Akuisisi, pengelolaan dan pelestarian arsip statis.
- Meningkatkan pengelolaan arsip, bahan pustaka dan dokumentasi.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar.
- Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam/luar negeri di bidang kearsipan dan dokumentasi.

2.3.2 Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2021 - 2026

SOPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2021	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN RPJMD (2026)
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang dibaca dipergustakaan (Eksemplar)	Eksemplar	120.000	145.000	147.000	150.000	155.000	160.000	160.000
		Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (orang)	Orang	25.675	26.675	27.675	28.675	29.675	31.000	31.000
		Jumlah Lembaga Perpustakaan yang diberikan pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Unit)	Unit	5	14	24	34	44	54	54
		Ideks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan (%)	%	70	90	95	100	100	100	100
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	Judul	30.000	32.000	35.000	50.000	60.000	70.000	70.000
2	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan (Naskah)	Naskah	0	1	1	1	1	1	1
3	Meningkatkan pengelolaan arsip	Persentase SOPD menerapkan arsip secara	%	95	96	97	98	99	100	100

	yang tertib, rapi dan handal	baku sesuai dengan standar kearsipan (%)								
4	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	%	95	96	97	98	99	100	100

2.3.3 Rencana Strategis Rancangan Akhir 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip											
- Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan	Terwujudnya budaya gemar membaca, kualitas sumber daya manusia melalui perpustakaan dan pengelolaan kearsipan sesuai kaidah pemerintahan		Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	74	74,27	75,95	77,62	79,30	80,97	82,65	
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	71	71,8	73,50	76,68	78,5	81	83,5	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	55	60	65	70	75	80	85	
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	55	60	65	70	75	80	85	
		Meningkatnya Tingkat Digitalisasi Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	80	83	86	89	92	95	98	
			Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	80	83	85	87	89	91	92	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	71	71,8	73,50	76,68	78,5	81	83,5	
		Meningkatnya kegemaran membaca dan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	74	74,27	75,95	77,62	79,30	80,97	82,65	
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	65	70	75	80	85	90	95	
		Meningkatnya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	
		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

2.3.4 Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

- a. Memanfaatkan dukungan anggaran dari APBD/APBN dalam upaya pengembangan pendidikan melalui minat dan budaya baca masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta untuk memperoleh hidup yang layak serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat dan pelatihan teknis melalui program pengembangan Perpustakaan dan Arsip.
- c. Meningkatkan sistem manajemen perencanaan partisipatif dengan pelayanan administrasi berstandar.
- d. Kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif memberikan dukungan bagi aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang lebih baik.
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

2.4 RINCIAN ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.27.720.678.870,-. Anggaran Belanja Operasi, ditetapkan sebesar Rp 16.814.430.907,77 realisasi keuangan sebesar Rp 15.134.021.784,00 atau 90% dan fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp. 1.680.409.123,77- dan Belanja Modal Anggaran Belanja Modal, yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.906.247.962,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.897.614.786,- atau 99,92% dan fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp. 8.633.176,-.. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2025 dapat dilihat di bawah ini.

URAIAN	APBD	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)	Fisik
a. Belanja Operasi	16.814.430.907,77	15.134.021.784,00	1.680.409.123,77	90%	100
b. Belanja Modal	10.906.247.962	10.897.614.786	8.633.176	99,92%	100

2.4.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan tengah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1. Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Keterangan
1.	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Rp. 1.764.232.576	Sasaran Peningkatan Pelayanan di dukung oleh Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 11 (sebelas) sub kegiatan : 1. Pengembangan dan opemeliharaan layanan perpustakaan elektronik 2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi. 3. Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat provinsi 4. Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan SNP 5. Pembinaan perpustakaan khusus tingkat provinsi 6. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi 7. Pengembangan perpustakaan deposit 8. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka 9. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi 10. Sosialisasi budaya baca dan lietrasi pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat 11. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Rp. 327.020.897	Sasaran pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan : 1. Penghimpunan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam 2. Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 3. Penerbitan Katalog Induk Daerah 4. Penerbitan Bibliografi Daerah 5. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 6. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
3.	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal	Rp. 223.094.653	Sasaran Pengelolaan Arsip dinamis dan statis terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan : 1. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 2. Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi 3. Penciptaan dan pemeliharaan Arsip Dinamis 4. Akusisi Arsip Statis 5. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 6. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
4.	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Rp. 150.719.700	Sasaran Perlindungan dan penyelamatan arsip terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan : 1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 2. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi 3. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi 4. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota 5. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 6. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari visi dan misi instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem secara periodik yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk menentukan hasil dari pelaksanaan yang telah dicapai selama 1 tahun, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Serta Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap kinerja yang dicapai terutama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip terhadap meningkatkan mutu kinerja dalam pelayanan yang diberikan oleh pustakawan maupun arsiparis secara efisien, efektif, dan inovatif dalam memberikan kemajuan Perpustakaan dan Arsip yang lebih baik ke depannya. Pada, bab ini telah dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam LKIP dan Renstra. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II sebelumnya. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutnya rekomendasi hasil evaluasi, revidi dari semua program yang menjadi tolak ukur kinerja.

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama

No	Bidang Sektor	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja
1.	Perpustakaan	Meningkat interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatkan perpustakaan yang	1. Jumlah buku yang di baca di perpustakaan 2. Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan 3. Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan pembinaan perpustakaan berbasis inklusi sosial

		berbasis inklusi sosial baca	4. Indeks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan 5. Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan.
		Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam.	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan
2.	Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal.	Jumlah persentase OPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan
		Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai kaidah kearsipan	Jumlah persentase perlindungan dan penyelamatan arsip

Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) ada 4 bidang sektor dari 4 program inti dalam capaian kinerja yang telah dilaksanakan di tahun 2025 menjadi titik pusat pelayanan dan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, yang menjelaskan bahwa :

- Dengan meningkatnya pelayanan secara efisiensi dan efektif untuk pemustaka dari jumlah koleksi bahan pustaka yang dibaca, jumlah yang menjadi anggota pemustaka, jumlah buku yang dibantu ke setiap perpustakaan kabupaten/desa/kelurahan yang membutuhkan dan kepuasan pemustaka dalam layanan, fasilitas, jumlah koleksi buku, serta lingkungan yang kondusif dan nyaman.
- Dalam meningkatkan budaya gemar membaca diseimbangkan dengan jumlah koleksi bahan pustaka (judul, nama pengarang, tahun terbitan, dan kode buku) yang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
- Penyimpanan koleksi dan pengelolaan dalam berupa dokumen, foto/gambar, audio, dan video yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan pengenalan sejarah/koleksi yang dianggap sebagai pengetahuan.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama dengan Cara Perhitungan Tahun 2025

No.	Sasaran Stratejis	Indikator Kinerja Utama	Cara Hitung	Sumber Data
1.	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Layanan
		Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Layanan
		Jumlah perpustakaan yang diberikan pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Unit)	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Pengembangan
		Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan (%)	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terist Nilai Penimbang}} \times 100$	Bidang Layanan
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Layanan
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan (naskah)	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Deposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi
3.	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal	Persentase SOPD Menerapkan Arsip secara Baku sesuai Standar Kearsipan	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Arsip
4.	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Arsip

Tabel 3.3. Perjanjian Target Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025
1.	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (Eksemplar)	156.000
		Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (orang)	30.000
		Jumlah Perpustakaan yang diberikan pembinaan (lembaga/ perpustakaan)	34
		Ideks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan (%)	85%
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	38.000
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan (naskah)	1
3	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal	Persentase SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan (%)	60%
4	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	60%

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 telah disesuaikan dengan sasaran target pada RPJMD tahun 2021 – 2026 sebagai tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip terhadap pengembangan dan peningkatan gerakan budaya gemar membaca, agar pemustaka/masyarakat lebih aktif untuk membaca, sebab buku adalah jendela dunia yang berisi tentang informasi berupa sejarah, budaya, bahasa, seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang tak akan pernah habis oleh zaman dan waktu, yang akan terus berkembang untuk kemajuan generasi selanjutnya.

3.2 EVALUASI DAN CAPAIAN ANALISIS KERJA

Dalam evaluasi dan analisis capaian kinerja dari perbandingan Tahun 2025 dan Tahun 2025 yang merupakan bagian sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Hal ini untuk mengenali factor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada Tahun 2025 dan atau Tahun berikutnya (performance improvement). Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang

dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut;

SASARAN 1

MENINGKATNYA INTERAKSI MASYARAKAT TERHADAP PERPUSTAKAAN SERTA MENINGKATNYA PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

Indikator	2025		
	Target	Capaian	Realisasi %
Jumlah buku yang di baca di perpustakaan	155.000 Eks	144.660 Eks	93,32%
Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	29.000 Orang	39.529 Orang	136,30%
Jumlah Perpustakaan yang dibina	34	124	364%
Indeks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan	85	86,44%	101,69%
Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan	38.000	37.559	98,83%

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran pelayanan perpustakaan

SASARAN 2

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam.

Indikator	2025		
	Target	Capaian	Realisasi %
Jumlah Naskah kuno yang terletarikan	1 laporan	2 laporan	200%

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi

SASARAN 3

Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal

Indikator	2025		
	Target	Capaian	Realisasi %
Persentase OPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	60%	55,75%	85,76%

Tabel 3.6. Capaian Pengelolaan Arsip Secara Baku Seluruh SOPD Provinsi Kalteng

SASARAN 4

Meningkatkan pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan.

Indikator	2025		
	Target	Capaian	Realisasi %
Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	60%	80%	80%

Tabel 3.7. Capaian Pengelolaan Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2025 dinilai pada berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014, yang hasil nilai capaian dari pencapaian tersebut sesuai dengan tujuan / sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang pada sasaran strategis dari penyelenggaraan akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan program kegiatan yang sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 = 100	Sangat Baik	Hijau tua
2	76 = 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 = 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 = 65	Rendah	Kuning Muda
5	= 50	Sangat Rendah	Merah

Tabel 3. 8. Skala Nilai Perangkat Kinerja

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov.Kalteng. Pengukuran dilakukan dari kinerja yang diperjanjikan untuk tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen LKIP tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

Kalteng menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih IKU yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU yang dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2025 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Capaian atas IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis.

Penilaian hasil capaian kinerja berdasarkan hasil sasaran dan realisasi IKU yang telah ditetapkan dengan target dan realisasi yang telah tercapai di Tahun 2025. Pada table dibawah ini menunjukan hasil capaian di Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2025	Target dan Capaian Triwulan Tahun 2025								Pencapaian Realisasi 1 Tahun
					I		II		III		IV		
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang dibaca dipergustakaan (Eksemplar)	Eksemplar	155.000	38.750	39.367	77.500	78.734	116.250	117.484	155.000	144.660	93,32%
		Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	Orang	29.000	7.000	9.815	14.000	20.629	21.000	31.629	29.000	39.529	136,30%
		Jumlah Perpustakaan yang diberikan pembinaan (Unit)	Lembaga	34	20	36	25	72	30	108	34	124	364%
		Indeks kepuasan pengujung terhadap Perpustakaan (%)	%	85	-	-	85%	85.55%	-	-	85	86,44%	101,69%
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	Judul	38.000	8.000	8.581	19.000	17.163	28.500	32.744	38.000	37.559	98,83%
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan (naskah)	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	1	2	200%
3.	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal	Persenatse SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	%	60	15	12,5%	30	19,8%	45	48,6%	60	55,75%	85,76%
4.	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	60	20	25	40	40	60	75	60	80%	80%

Perjanjian Kinerja Per Triwulan Tahun 2025

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Tahun 2025

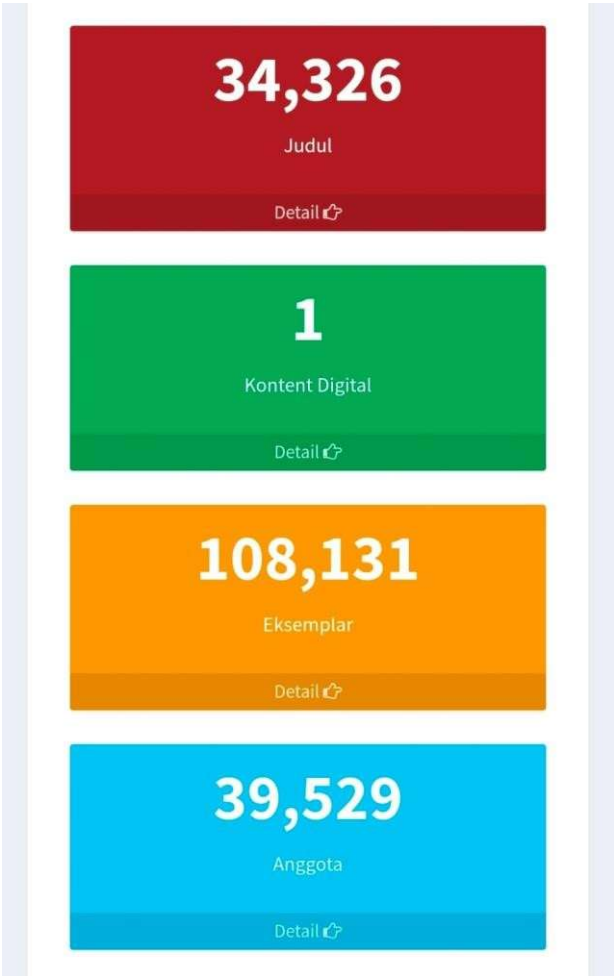
NO	SASARAN	INDIKATIOR KERJA	SATUAN	Target Capaian 1 Tahun			Kriteria/Kode
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang di baca di perpustakaan	Eksemplar	155.000	144.662	93,32%	Bidang Layanan
		Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan	Orang	29.000	39.529	136,30%	Bidang Layanan
		Jumlah Perpustakaan yang diberikan pembinaan	Lembaga/ perpustakaan	34	124	364%	Bidang Pengembangan
		Indeks kepuasan pengujung terhadap Perpustakaan	%	85	86,44%	101,69%	Sekretariat
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan	Judul	38.000	37.559	98,83%	Bidang Deposit
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan	Laporan	1	2	200%	Bidang Deposit
3	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal maupun arsip non aktif	Persentase SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	%	60	55,75%	85,76%	Bidang Arsip
4.	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	60	80%	80%	Bidang Arsip

Dari tabel di atas, terdapat 8 (delapan) indikator yang terbagi ke dalam 4 (empat) sasaran strategis. Pada tahun 2025, 8 (delapan) indikator tersebut terdapat 5 (Lima) indikator yang melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya peningkatan sarana dan fasilitas serta koleksi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.

3.3 REALISASI DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

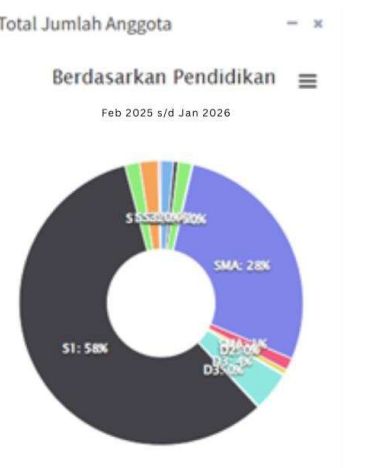
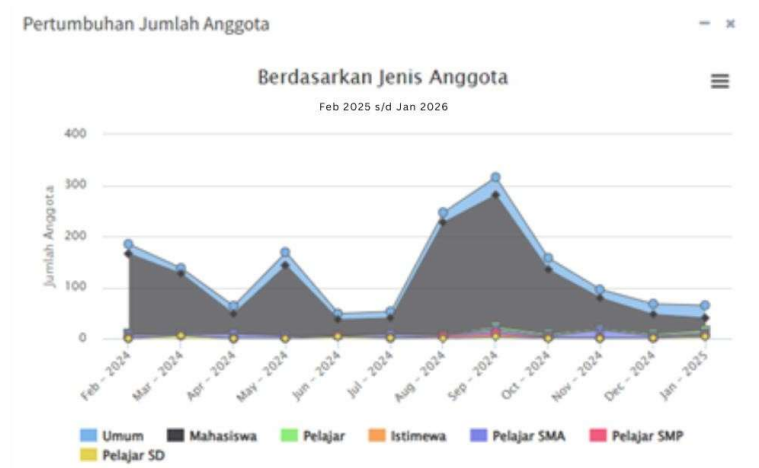
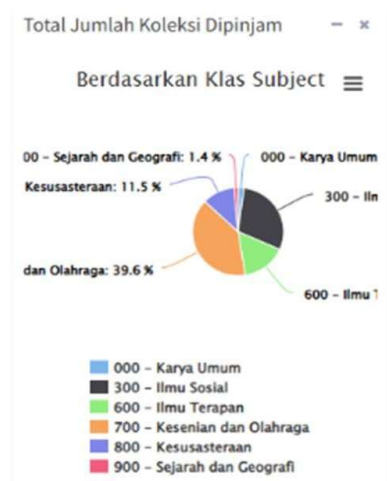
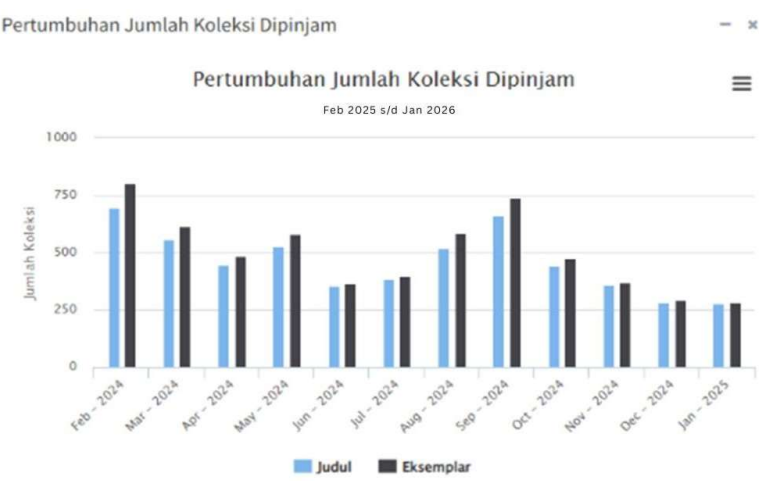
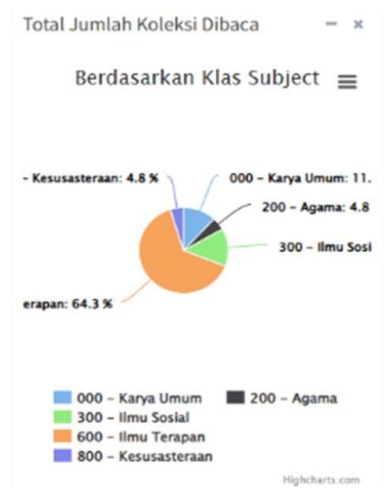
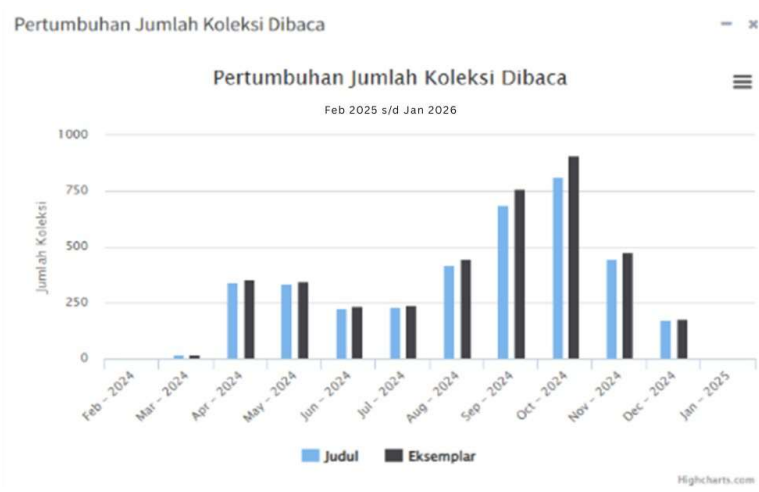
Realisasi pencapaian Data Indikator Kinerja Utama terdiri dari sebagai berikut :

a. Indikator Data Sistem Informasi Perpustakaan Lokal

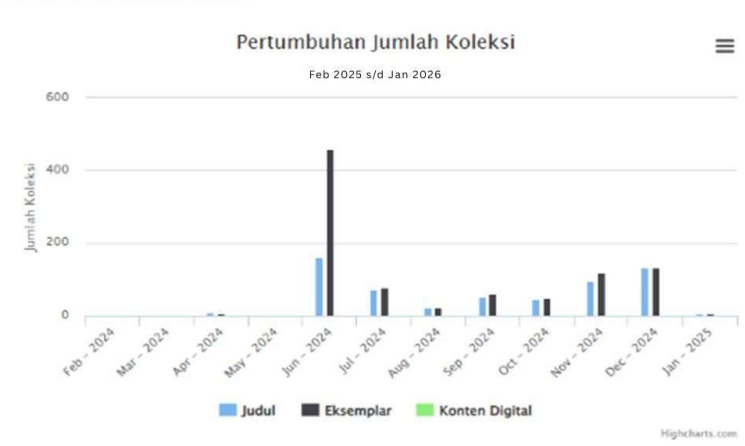


b. Data Pembaca dan Pengunjung

No	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1	Januari	8.420
2	Februari	15.880
3	Maret	18.940
4	April	7.960
5	Mei	12.870
6	Juni	17.560
7	Juli	16.430
8	Agustus	6.980
9	September	11.760
10	Oktober	17.240
11	November	6.540
12	Desember	4.082
	TOTAL	144.622



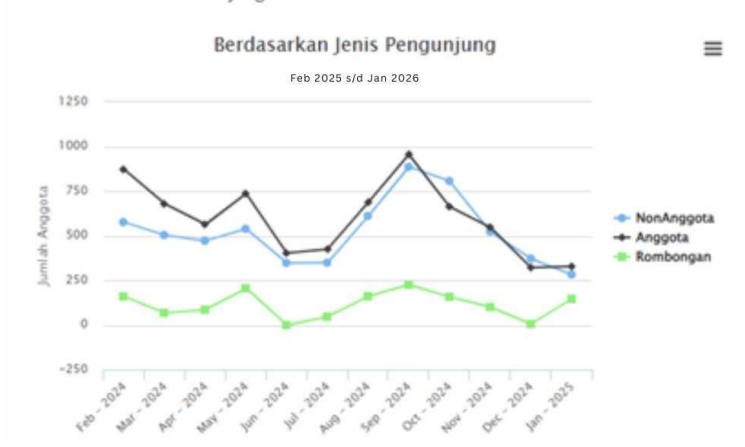
Pertumbuhan Jumlah Koleksi



Total Jumlah Koleksi



Pertumbuhan Jumlah Kunjungan



Total Kunjungan Anggota



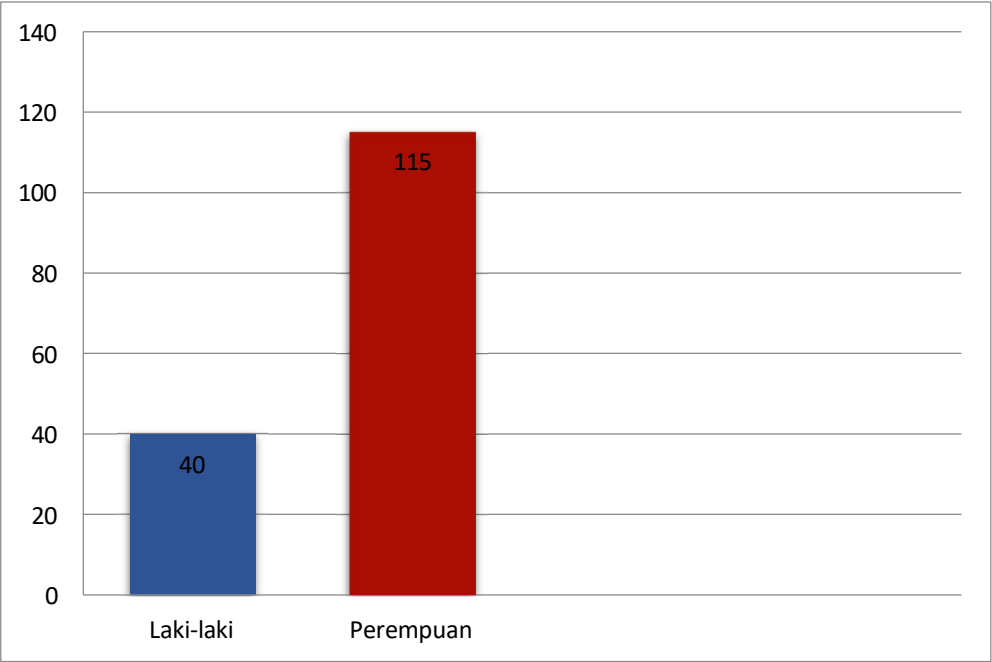
c. Jumlah Perpustakaan (Unit)

Untuk jumlah unit perpustakaan yang ditargetkan di tahun 2025 untuk dilakukan pembinaan terdiri dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah (SMA/SMK/SLB), Perpustakaan Desa yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat / Pemustaka

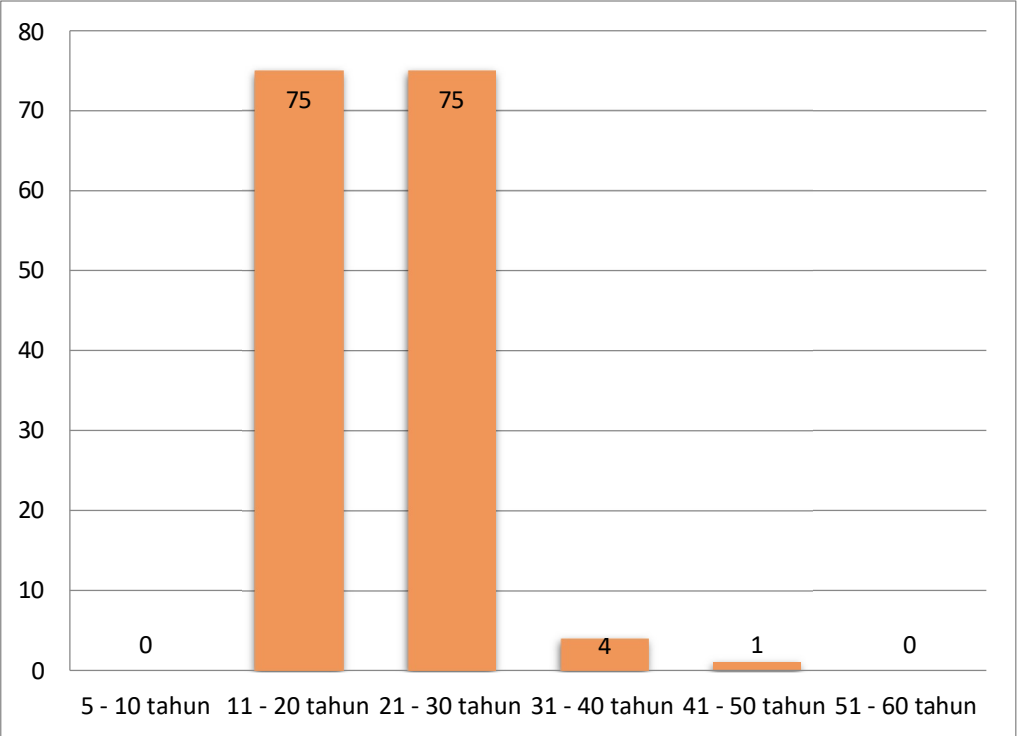
Dalam menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari 155 Responden Kuesioner yang diambil pada Semester III Tahun 2025 dengan profil berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan pemustaka di Kota Palangka Raya. Pengukuran serta penilaian terlihat dari grafik dan tabel sebagai berikut.

1. Jenis Kelamin

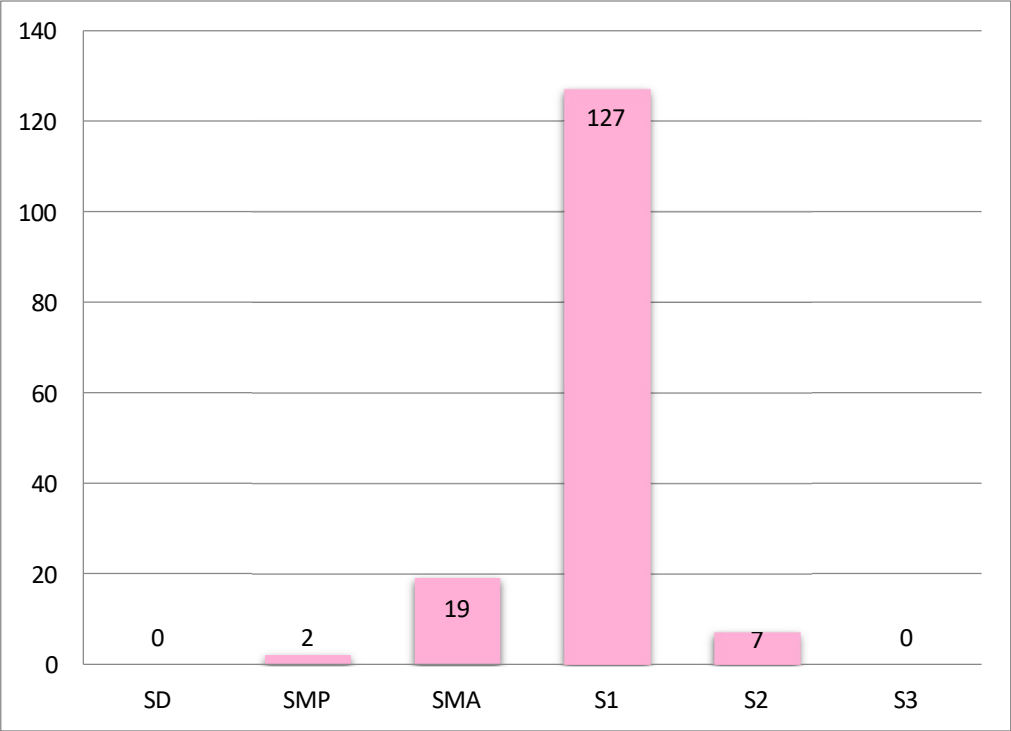


Gambar : Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

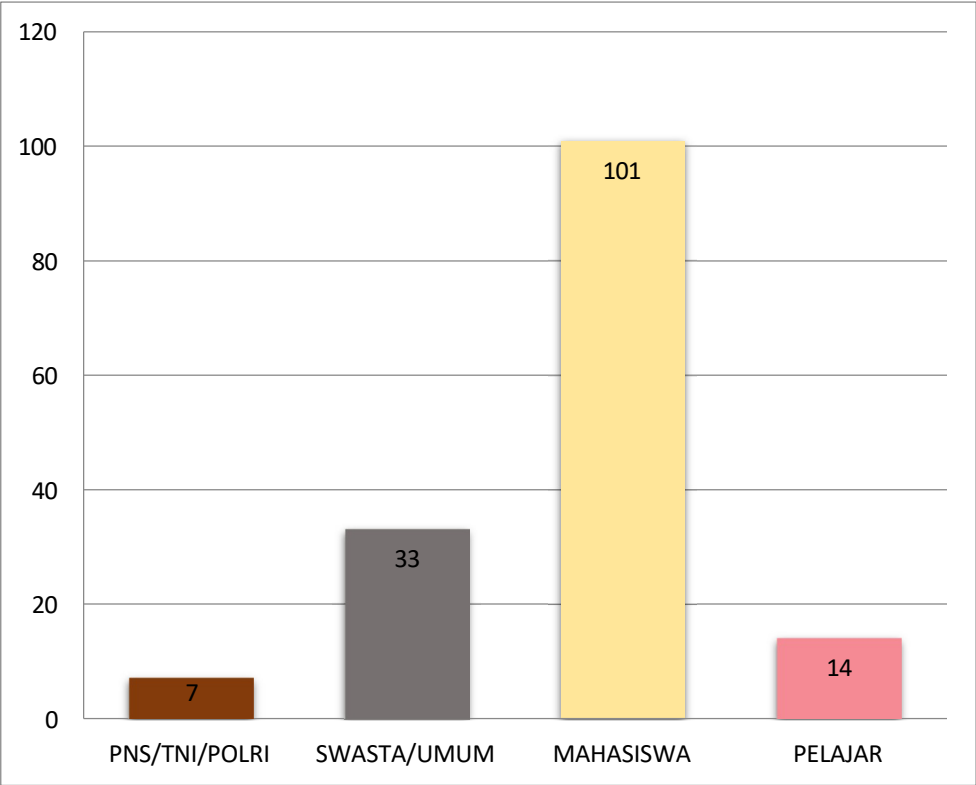
2. Umur



3. Pendidikan



4. Pekerjaan



Gambar : Grafik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan	Bobot	(3) x (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan	3,265	Baik	0,111	0,362
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,432	Baik	0,111	0,381
3	Waktu dan penyelesaian	3,258	Baik	0,111	0,362
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,929	Sangat Baik	0,111	0,436
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,252	Baik	0,111	0,361
6	Kompetensi Pelaksana**)	3,677	Sangat Baik	0,111	0,408
7	Perilaku Pelaksana**)	3,426	Baik	0,111	0,380
8	Sarana dan Prasarana	3,323	Baik	0,111	0,369
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,781	Sangat Baik	0,111	0,420
Nilai Indeks		3,479			
Nilai IKM		86,974			
Mutu Pelayanan		B			
Kinerja Unit Pelayanan		Baik			

Berikut uraian nilai tiap unsur pelayanan :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Berdasarkan hasil survei, persyaratan masuk kategori Baik (3,265). Hal ini dapat dilihat dari indikator proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka yang mudah.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur pelayanan dilakukan antaranya mencakup pelayanan bidang pendaftaran anggota dan sirkulasi memenuhi kategori Baik (3,432) dikarenakan persyaratan pembuatan kartu sangat mudah dan gratis (tidak dikenakan biaya), baik konvensional maupun online.

3. Waktu dan Penyelesaian

Waktu dan penyelesaian pelayanan yang diberikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sesuai SOP, sehingga nilai unsur ini adalah Baik (3,258).

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

Kesungguhan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan terutama konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai unsur ini adalah Sangat Baik (3,929).

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan yang diharapkan pemustaka, peningkatan penyediaan koleksi bahan pustaka sehingga unsur ini dikategorikan Baik (3,252). Adapun produk pelayanan yang diberikan terdiri dari :

- a. Layanan peminjaman dan pengembalian buku konvensional
Peminjaman dan Pengembalian koleksi perpustakaan konvensional dilakukan secara manual, pemustaka bisa langsung datang dan memilih langsung koleksi yang ada dipinjam.
- b. Layanan pemesanan dan perpanjangan buku via online
Layanan via online ini memudahkan pemustaka untuk bisa melakukan sistem pemesanan buku dan juga perpanjangan peminjaman buku melalui website ataupun via whatsapp.
- c. Layanan akses katalog online perpustakaan
Untuk melihat daftar koleksi perpustakaan yang tersedia diperpustakaan pemustaka bisa mengakses melalui website Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah di <https://dispursip.kalteng.go.id> dan memilih OPAC (*Online Public Access Cataloging*).
- d. Layanan pendaftaran anggota perpustakaan via website
Dengan adanya layanan pendaftaran melalui website, pemustaka bisa melakukan pendaftaran sebagai anggota melalui komputer maupun gadget secara mandiri.
- e. Layanan ikalteng
Ikalteng ini adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan ereader untuk membaca ebook, dengan fitur-fitur media sosial pemustaka dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain di mana saja dan kapan saja.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana dalam hal ini petugas pelayanan telah memiliki tingkat keahlian dan keterampilan yang baik. Nilai unsur ini dikategorikan Sangat Baik (3,677).

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana dalam hal ini petugas pelayanan memiliki tingkat keahlian dan keterampilan yang baik dan juga mendapatkan respon positif dari para pemustaka atau pengunjung perpustakaan. Nilai unsur ini dikategorikan Baik (3,426).

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin), sedangkan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Unsur ini masuk dalam kategori Baik (3,323).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengaduan-pengaduan dan tindak lanjutnya untuk mendapatkan *feedback* dari hasil pelayanan. Unsur ini mendapatkan hasil kategori Sangat Baik (3,781).

e. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

Pada tahun 2025 jumlah koleksi pustaka untuk triwulan IV dengan jumlah judul koleksi 33.135 dan 146.000 jumlah eksemplar, sedangkan pengadaan di tahun 2025 sebanyak 1.000 judul.

f. Realisasi

Dengan rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan perincian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip pada Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.11. Program Kegiatan Realisasi Anggaran IKU Tahun 2025			
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Target	Realisasi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	8.177.900
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA RKA-SKPD	10.000.000	9.925.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	8.843.500
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.806.500
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	10.000.000	8.739.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	7.844.000	7.781.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.586.232	233.659.403
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.754.765.855	8.163.296.849
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.953.000
10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.500.000	4.796.000
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.749.500
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	210.668.601	198.009.000
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	101.489.700	79.066.600
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.672.800	38.235.000
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.730.881.261	1.711.725.900
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.636.377	40.529.000
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	33.105.000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.866.475	277.000.882
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454.432.756	273.386.674
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.941.545	30.620.000

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.505.945.024	1.397.862.065
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.502.250	202.666.233
24	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	29.105.000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.164.694.692	2.134.761.703
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	84.267.365
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	99.550.000	83.400.000
2	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	101.112.000	100.087.930
3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional	99.100.000	83.682.274
4	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	49.100.000	45.367.750
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	264.900.000	228.612.776
6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	137.500.000	121.888.200
7	Pengembangan Perpustakaan Deposit	103.658.928	103.279.950
8	Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka	260.961.648	260.118.650
9	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	137.500.000	137.208.000
10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan	77.850.000	69.620.074
11	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	137.500.000	118.289.370
12	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	108.000.000	87.364.000
13	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	137.500.000	132.270.000
14	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	38.029.750

III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50.068.737	50.053.375
2	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	96.970.000	92.751.650
3	Penerbitan Katalog Induk Daerah	27.564.900	27.556.900
4	Penerbitan Bibliografi Daerah	23.850.480	23.786.500
5	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	75.749.776	75.588.250
6	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	12.250.000	12.192.450
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	58.051.670	48.016.862
2	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentifikasi	77.605.098	66.581.680
3	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	71.574.534	69.403.809
4	Akuisisi Arsip Statis	36.035.327	30.698.400
5	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	54.300.000	54.108.050
6	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	29.454.268	25.567.500
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	43.697.290	36.881.000
2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	59.016.775	49.513.350
3	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	32.460.000	30.757.996
4	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	29.413.078	26.857.400
5	Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	24.607.510	24.054.960
6	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	33.900.000	27.148.240

Dalam IKU ada 5 program dan 56 Sub Kegiatan yang telah terlaksana di Tahun 2025 dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA serta realisasi keuangan yang digunakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam pengelolaan anggaran untuk 5 program tersebut sebagai titik pusat utama pencapaian IKU terhadap hasil penilaian evaluasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari kinerja capaian Dinas Perpustakaan dan Arsip di Tahun 2025.

Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Disusun Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025 (Triwulan IV – Keadaan Bulan Desember 2025)

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)	Fisik
Belanja Operasi	14.961.513.855	13.676.882.167	1.284.631.688	91,41%	100
Belanja Modal	3.760.715.732	3.704.012.003	56.703.729	98,49%	100

Tolak Ukur Capaian Sasaran

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat pemakai jasa perpustakaan dalam mencerdaskan bangsa, melalui peningkatan minat baca menjadi budaya baca terdiri dari 4 (Empat) indikator yaitu indikator:

1. Jumlah buku yang di baca di perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah peminat yang membaca di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di tahun 2025 adalah 108.131 buku.
 - a. Koleksi bacaan yang masih tergolong terbatas maksudnya adalah kurangnya jumlah koleksi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, kebanyakan mereka yang datang pulang tanpa menemukan buku yang mereka baca.
 - b. Faktor yang kedua yaitu sarana dan Prasarana yang di buat Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov kalteng cukup nyaman, hal ini tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah untuk membuat perpustakaan yang lebih nyaman dan indah.
 - c. Teknologi informasi yang lebih dominan, mengakibatkan generasi sekarang lebih cenderung menggunakan media yang sifatnya digital.

2. Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah pembuatan kartu anggota perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di tahun 2025 adalah 39.529 orang.
3. Jumlah Perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah bantuan dan Pembinaan yang di berikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng kepada Perpustakaan Kabupaten/Kota di kalikan seratus di bagi target tahun 2025.
4. Indeks kepuasan pengunjung di hitung berdasarkan jumlah pengunjung yang datang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di Tahun 2025 sebesar 86,97. Dari hal tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhi antara lain
 - a) Faktor kenyamanan, sering kali para pemustaka melihat penampilan perpustakaan sangat membosankan,
 - b) Kurangnya perhatian pemerintah dan
 - c) Teknologi informasi peralihan media cetak ke multimedia, maka dari itu untuk tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng berupaya membangun perpustakaan berbentuk Web (E-Book) yang sudah dapat di akses dengan media elektronik.

Gambar 3.1. Aktifitas masyarakat di Perpustakaan



Gambar 3.2. Pelayanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan



Gambar 3.3. Pelayanan Ruang Umum Dewasa



Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: jumlah koleksi bacaan, yang dihitung berdasarkan penambahan buku (Judul) dikalikan seratus dibagi target tahun. Di tahun 2025 dengan target 150.000 judul dan realisasi 22,60%, target tidak tercapai dikarenakan, sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya anggaran dalam pengadaan koleksi buku yang tiap tahun buku disesuaikan dengan kebutuhan referensi bagi pemustaka, tahun terbitan dan pengarang yang dibutuhkan oleh pemustaka;
- b. Koleksi buku di tahun-tahun sebelumnya yang sudah tidak layak layan (terkena widing sortir) menjadi dampak kurangnya jumlah buku untuk penambahan target yang ingin dicapai.



berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan Solusi :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
Terdapatnya koleksi bahan pustaka yang selalu up to date setiap tahunnya	Belum maksimalnya koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat	Memaksimalkan kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat dengan melakukan survey kebutuhan bahan pustaka baik secara kontekstual dan online
Jumlah Pemustaka	Rendahnya informasi dari penerbit tentang bahan pustaka yang terbaru (judul-judul baru)	Perlu dilakukan koordinasi secara rutin dengan penerbit sebagai referensi bagi Pemustaka.
Tersedianya SDM untuk mengelola bahan pustaka	Kurangnya Anggaran	Perlu dilakukan penambahan Anggaran guna Pelatihan SDM di Bidang Perpustakaan.

Capaian sasaran pengelolaan arsip secara baku seluruh SOPD Prov kalteng

Indikator	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Jumlah SOPD menerapkan Kearsipan secara baku sesuai dengan standar Kearsipan	48 SOPD	48	100%	48 SOPD	48	100 %

Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan kesadaran aparaturnya pengelolaan kearsipan, baik pengelolaan arsip aktif maupun arsip non aktif terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan, yang dihitung berdasarkan jumlah SOPD menerapkan arsip secara baku dikalikan seratus dibagi target tahun yang ditentukan.

Meningkatnya kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengumpulan arsip-arsip dinamis gunanya sebagai pelestarian dokumen- dokumen/ arsip daerah yang ada di Kalimantan Tengah, dalam tahun 2025 ditargetkan 48 SOPD telah tercapai sebanyak 48 SOPD yang sudah diberikan pembinaan tentang kearsipan.

Walaupun target telah tercapai tetapi masih terdapat hal-hal yang juga mempengaruhi SOPD dalam menerakan arsip Secara baku dan Dinamis diantaranya :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
Adanya kegiatan sosialisasi kearsipan setiap tahunnya	Masih rendahnya kesadaran aparaturnya dalam pengelolaan arsip	Mengikutertakan para pengelola arsip SKPD pada bintek dan Penambahan Anggaran untuk kegiatan kearsipaan
Penyuluhan kearsipan secara terjadwal	Kurangnya tenaga Arsiparis/Petugas Khusus pengineola Kearsipan SKPD	Mengangkat petugas kearsipan di SKPD
Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	Minimnya anggaran untuk Sarana kearsipan	Menganggarkan untuk kebutuhan sarana kearsipan SKPD

Daftar Nama SOPD Yang Menerapkan Arsiop secara Baku sesuai Standar Arsip Nasional

No.	Daftar Nama SKPD
1.	Biro Administrasi Pimpinan
2.	Biro Pemerintah Otonomi Daerah
3.	Biro Administrasi Pembangunan
4.	Biro Hukum
5.	Biro Administrasi Perekonomian
6.	Biro Kesejahteraan Rakyat
7.	Biro Pengadaan Barang/Jasa
8.	Biro Organisasi
9.	Biro Umum
10.	Sekretariat DPRD Provinsi
11.	Inspektorat Provinsi
12.	Dinas Pendidikan
13.	Dinas Kesehatan
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
16.	Satuan Polisi Pamong Praja
17.	Dinas Sosial
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20.	Dinas Ketahanan Pangan
21.	Dinas Lingkungan Hidup
22.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25.	Dinas Perhubungan
26.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
27.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
28.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

29.	Dinas Pemuda dan Olahraga
30.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31.	Dinas Perpustakaan dan Arsip
32.	Dinas Kelautan dan Perikanan
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Peternakan
34.	Dinas Perkebunan
35.	Dinas Kehutanan
36.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
37.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
39.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
40.	Badan Kepegawaian Daerah
41.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
42.	Badan Pendapatan Daerah
43.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
44.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
45.	Badan Penghubung
46.	Rumah Sakit Umum Dr. Doris Sylvanus
47.	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
48.	RSUD Hanau

3.1 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 18.722.229.587 terdiri Belanja Operasi sebesar Rp 14.961.513.855 realisasi keuangan sebesar Rp 13.676.882.167 atau 91,47% dan fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp. 1.284.631.688 dan Belanja Modal yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.760.715.732 dengan realisasi keuangan Rp. 3.704.012.003 atau 98,49% dan fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp. 56.703.729.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2025 dapat dilihat dibawah ini.

URAIAN	APBD	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)	Fisik
Belanja Operasi	14.961.513.855	13.676.882.167	1.284.631.688	91,41%	100
Belanja Modal	3.760.715.732	3.704.012.003	56.703.729	98,49%	100

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2025

(yang mendukung capaian sasaran strategis)

Tabel III.7 Realisasi Keuangan Per Program Kegiatan							
No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Target Capaian Triwulan			Ket
				Target	Realisasi	Capain (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	19.283.900	96,42	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA RKA-SKPD	17.500.000	17.500.000	17.486.500	99,81	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.774.984.973	7.774.984.973	6.783.787.500	87,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.583.750	16.583.750	14.821.000	89,37	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.462.000	35.462.000	33.639.500	94,86	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	79.260.000	79.260.000	76.414.959	96,41	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.460.000	197.460.000	187.681.900	95,16	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.600.000	8.600.000	7.533.527	87,60	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrk Penerangan Bangunan Kantor	43.500.000	43.500.000	43.488.000	99,97	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.226.610	72.226.610	71.369.000	98,81	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.609.000	49.609.000	44.518.000	89,74	
		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	35.004.400	35.004.400	35.004.400	100	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.539.000	243.539.000	243.483.656	99,98	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.140.000	510.140.000	407.776.026	79,93	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.226.610	72.226.610	71.369.000	98,81	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	952.035.400	952.035.400	836.698.172	87,89	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.955.000	235.955.000	179.532.715	76,09	
		Pemeliharaan Mebel	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.190.700	85.190.700	85.056.200	99,84	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA AN	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	150.000.000	150.000.000	145.538.100	97,03	
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	322.000.000	322.000.000	183.801.000	57,08	
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	40.000.000	40.000.000	39.880.750	99,70	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	116.000.000	116.000.000	80.253.500	69,18	

		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	60.000.000	60.000.000	57.714.360	96,19	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	52.000.000	52.000.000	44.227.600	86,05	
		Pengembangan Perpustakaan Deposit	44.000.000	44.000.000	43.909.250	99,79	
		Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka	240.500.000	240.500.000	239.398.000	99,54	
		Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi	100.000.000	100.000.000	76.563.000	76,56	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	180.000.000	180.000.000	161.648.141	89,80	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	120.000.000	120.000.000	106.017.800	88,35	
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	55.500.000	55.500.000	55.447.000	99,96	
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	83.000.000	83.000.000	80.461.000	96,94	
		Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	117.759.300	117.759.300	112.785.400	95,76	
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	48.521.000	48.521.000	43.126.000	88,88	

		Kearsipan Daerah Provinsi					
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	17.236.100	17.236.100	16.530.600	95,91	
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	73.461.300	73.461.300	64.036.690	78,17	
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	60.022.300	60.022.300	59.588.240	99,28	

Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan APBN TA. 2025

NO	KEGIATAN		REALISASI		
	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEUANGAN		FISIK (%)
			Rp	(%)	
A	DEKONSENTRASI				
1	Pembinaan Administrasi Keuangan	53.460.000	53.400.000	99,89	100
2	Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik	130.860.000	130.395.600	99,65	100
3	Workshop Akreditasi Perpustakaan	49.972.000	49.972.000	100	100
4	Pendataan Perpustakaan	64.450.000	64.450.000	100	100
	TOTAL DEKONSENTRASI (A)	298.742.000	298.217.600	99,82	100

BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Arsip kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih baik ke depannya.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumberdaya yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2025 ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan dan dengan laporan LKIP ini diharapkan dapat memacu palaksanaan program pemerintah yang melibatkan stakenholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Palangka Raya, 22 Februari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



ADIAH CHANDRA SARI, S.H., M.H.
NIP. 19700629 20003 2 001